

PENURUNAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

Oleh : Nurdina Fitri Arizal

Pembimbing : Hasanuddin

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

One of the activities to channel public participation in a democratic country is by channeling votes during general elections held by the General Elections Commission. However, in the Dumai Mayoral Election which was held on December 9, 2020, the level of community participation during the election decreased compared to the 2015 Dumai Mayoral Election. Of course, this decline occurred not without cause, this could be influenced by several factors. This study aims to describe a decrease in the level of political participation in the 2020 Dumai Mayoral Election. In achieving the objectives of this study, the authors used the theory from Eep Saefulloh Fathah concerning four factors that cause a person not to exercise his right to vote.

The research method used is a qualitative method by explaining descriptively. The type of research data used is primary data in the form of data obtained from research informants and secondary data obtained from related documents that can support data for research. The research location is in Dumai City, Riau Province.

This study found that the decline in the level of community political participation in the 2020 Dumai Mayoral Election occurred due to technical factors in the holding of elections which could not be held properly due to the Covid-19 pandemic, meanwhile the socialization factor had been carried out to the maximum extent possible by the General Election Commission of Dumai City in accordance with the procedures for holding elections that have been determined. However, the political factor in this case, the death of one of the candidates for Mayor of Dumai made sympathizers lose interest in voting for him. Meanwhile, administrative factors have been held and produce voter data for the 2020 Dumai Mayoral Election. So the authors draw the conclusion that the 2020 Dumai Mayoral Election has been carried out in accordance with the stages and regulations set by the KPU. However, the decline in community participation that occurred was due to the main obstacle that occurred in the Covid-19 pandemic. So that it has an impact on reducing voter turnout, in accordance with the four factors that cause a person not to exercise their right to vote, namely technical factors, political factors, socialization factors, and administrative factors.

Keywords: Decrease, Political Participation, Participation Level

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Mayoritas di Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi tersebut. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, dianggap sebagai hasil yang akurat dari partisipasi dan aspirasi dari masyarakat (Budiardjo, 2008). Oleh sebab itu partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat, untuk itu masyarakat berhak turut serta dalam menentukan keputusan politik. Maka, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1999).

Di Indonesia sendiri sudah tertuang di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya, secara khusus juga dibuat undang – undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum yang tertuang didalam Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Didalam undang - undang tersebut dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan sosialisasi serta berbagai tahapan pemilu.

Selain itu, Indonesia sebagai suatu Negara demokrasi telah melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah di setiap periodenya sejak tahun 2005 hingga saat ini.

Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk daerah Provinsi Riau sendiri, telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara itu, di Kota Dumai telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung sejak tahun 2005 hingga saat ini. Kota Dumai sebagai daerah yang telah melaksanakan pemilihan secara langsung sebanyak lebih dari tiga kali, tentunya partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat diperhatikan. Yang mana jumlah partisipasi sebagai tolak ukur dalam menentukan seberapa banyak masyarakat telah ikut serta dalam pemilihan . Karena, tinggi rendahnya suatu partisipasi merupakan salah satu sinyal serta indikator penting dalam berjalannya proses demokrasi. Namun, dalam realitasnya pada pemilihan walikota yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam pemilihan justru mengalami penurunan. Jika diperhatikan pula pada beberapa pemilihan yang dilaksanakan di Kota Dumai, baik pemilihan Walikota hingga pemilihan Gubernur. Dalam rentang tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah partisipasi masyarakat pada saat pemilihan selalu rendah. Kenaikan jumlah partisipasi masyarakat sempat terjadi di tahun 2019 pada saat pemilihan umum serentak. Namun, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Semula pemilihan hanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk penggantian kepala daerah, hingga berkembangnya peraturan tentang pemilihan kepala daerah yang mana pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Sehingga terjadilah perubahan, dimana sebelumnya pemilihan kepala daerah

dilaksanakan hanya pada tahun yang sama namun belum tentu diselenggarakan pada bulan dan tanggal yang sama.

Namun, seiring berselangnya waktu pelaksanaan pilkada serentak juga harus terhalang dengan kondisi penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret tahun 2020. Wabah ini menyebar merata di seluruh wilayah di Indonesia hingga mengakibatkan korban jiwa sehingga selalu terjadi peningkatan jumlah pasien maupun korban dari waktu ke waktu, oleh karena itu, pemerintah menetapkan wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Hal tersebut tentunya juga akan berdampak kepada penyelenggaraan pilkada serentak yang semulanya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, sehingga harus ditunda demi kelancaran serta keamanan masyarakat. Meskipun begitu demokrasi harus tetaplah berjalan, maka dalam situasi darurat pandemi wabah virus Covid-19 tersebut Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) DPR RI bidang dalam negeri, sekretaris negara, dan pemilihan umum, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) lewat rapat yang diadakan di gedung DPR-RI pada Senin, 21 September 2020 menyepakati

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung namun diundur pelaksanaannya sehingga menjadi tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19 di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak (KOMISI II DPR-RI, 2020). Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam kondisi bencana non alam yang mana dijelaskan pada pasal 5 ayat 1, bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Kota Dumai juga menjadi sorotan yang menarik apalagi pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga tentunya juga merubah pola perilaku atau kebiasaan masyarakat dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Sebagai daerah dengan tingkat keberagaman serta mobilitas yang tinggi tentunya perlu upaya serta pola – pola tertentu dalam rangka menjaga tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam memilih pemimpin daerah.

Tabel 1. Persentase Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Provinsi Riau Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan	Partisipasi Pemilihan Tahun 2015 (%)	Target Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Keterangan (Selisih dibanding 2020) (%)
1	Kabupaten Indragiri Hulu	57,84	77,50	65,59	↑7,75
2	Kota Dumai	68,13	77,50	63,01	↓5,12
3	Kabupaten Bengkalis	60,60	77,50	71,74	↑11,14
4	Kabupaten Kuantan Singingi	72,73	77,50	69,95	↓2,78
5	Kabupaten Siak	57,90	77,50	66,86	↑8,96
6	Kabupaten Rokan Hilir	60,87	70	69,78	↑8,91
7	Kabupaten Rokan Hulu	72,45	77,50	71,75	↓0,7
8	Kabupaten Pelelawan	69,34	77,50	76,82	↑7,48
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	65,40	77,50	70,32	↑4,92
10	Rata - Rata Provinsi Riau	65,03	77,50	69,66	

Sumber : KPU Provinsi Riau (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan fakta dan data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, bahwa pada Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Provinsi Riau dilaksanakan secara serentak di 9 Kabupaten/Kota. Di antara 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan, lima di antara Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan jumlah tingkat partipasi pemilih yang cukup signifikan. Namun hal sebaliknya terjadi

pada 3 Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu yang justru mengalami penurunan. Namun, di antara 3 Kabupaten/Kota tersebut Kota Dumai merupakan daerah dengan penurunan tingkat partisipasi yang paling tinggi yaitu mencapai 5,12% dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.

Berikut ditampilkan tabel data partisipasi pemilih di Kota Dumai antara Pilkada tahun 2015 dan Pilkada tahun 2020 yang dapat dijadikan sebagai data pembandingan partisipasi pemilih.

Tabel 2. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Dumai Tahun 2015 dan Pilkada Kota Dumai Tahun 2020

NO	Kecamatan	Partisipasi Pemilih Tahun 2015		Partisipasi Pemilih Tahun 2020	
		Jumlah Suara	Persentasi Pemilih (%)	Jumlah Suara	Persentasi Pemilih (%)
1	Dumai Barat	17.759	73,18	19.695	69,04
2	Dumai Timur	25.474	66,90	27.804	61,02
3	Dumai Kota	17.883	63,61	17.718	59,50
4	Dumai Selatan	20.708	65,38	22.453	63,84
5	Bukit Kapur	17.483	68,95	19.381	61,85
6	Medang Kampai	4.864	68,49	6.499	64,21
7	Sungai Sembilan	14.772	71,40	16.796	63,69
Total		118.943	68,13	130.347	63,01

Sumber : Data Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2015 di Kota Dumai mencapai 68,13% dengan jumlah DPT 170.883 jiwa. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai terdapat sebanyak 204.086 pemilih yang terdaftar di dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) yang terdiri atas pemilih laki – laki sebanyak 103.682 serta pemilih perempuan sebanyak 100.404.

Sementara itu, partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Dumai tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 63,01%. Dari total pemilih sebanyak 204.086, hanya 128.809 pemilih yang ikut serta pada pemilihan Walikota. Maka dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan *non-voting* pada Pemilihan Walikota Dumai tahun 2020 sebanyak 5,12%. Penurunan tingkat partisipasi ini tentunya juga berhubungan dengan pelaksanaan pemilu di masa pandemi Covid-19 sehingga penyelenggaraan serta tahapan pemilu akan

berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kemajuan serta mobilitas dari masyarakat Kota Dumai juga tentunya akan menjadi faktor yang menyebabkan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor - faktor tersebut tentunya bisa dari faktor teknis, faktor politik, faktor sosialisasi, maupun faktor administrasi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dumai tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji judul **“Penurunan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian, yaitu “Mengapa terjadi

penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian ini. Maka yang menjadi tujuannya adalah Untuk Menjelaskan faktor – faktor penurunan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat Pada Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian komparatif antara pengetahuan teoritis dan praktek lapangan, serta memberikan referensi bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan, tentang Penurunan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020.
2. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui faktor penyebab dari penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota Dumai tahun 2020.

KAJIAN TEORI

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik baik secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat maupun sekelompok masyarakat bisa dikatakan ikut serta dalam partisipasi politik ketika terlibat dalam kehidupan politik salah satunya tentu dengan menyalurkan suara di saat pemilihan lewat Komisi Pemilihan Umum. Menurut

(Budiardjo, 2008) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang dimaksud bisa berupa pemberian suara dalam suatu pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Eep Saefulloh Fatah (Fatah, 2007), terdapat empat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu :

1. Faktor Teknis

Disebabkan karena adanya kendala teknis yang dihadapi oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk turut serta menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemilih tersebut sedang sakit, ada kegiatan lain, ada diluar daerah, pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalangi untuk menggunakan hak pilih, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut hal yang pribadi. Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi aktor yang mana dalam hal ini pemilih secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana sekitar, dan ancaman (Surbakti, 1999). Hal ini juga berkaitan dengan pemilih rasional, yang mana melihat kegiatan memilih sebagai proses kalkulasi untung dan rugi. Pemilih memiliki pertimbangan

apakah mengikuti kegiatan pemilihan kemungkinan mempengaruhi suaranya akan besar dan kandidat yang akan dipilih akan terpilih atau sebaliknya, dalam mengikuti kegiatan pemilihan lebih banyak menimbulkan resiko sehingga lebih banyak merugikan pemilih dari berbagai aspek (Surbakti, 1999).

2. Faktor Politik

Disebabkan karena aspek politik masyarakat yang tidak mau memilih. Seperti tidak punya pilihan di antara kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, atau ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih. Beredarnya berita negatif yang menerpa calon yang merupakan politisi tentunya juga akan berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain bisa diakibatkan oleh politisi yang berkonflik antar partai politik yang berbeda, sehingga membuat masyarakat antipati terhadap partai politik tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran politik serta kepercayaan kepada pemerintah. Yang mana kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pada pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Surbakti, 1999).

3. Faktor Sosialisasi

Karena intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, kepala desa, Bupati/Walikota, Gubernur, pemilu legislatif, hingga Presiden. Maka sosialisasi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sosialisasi politik merupakan sosialisasi insani ditengah suatu kebudayaan politik.

Dalam konteks komunikasi politik, berlangsung atau tumbuhnya partisipasi politik sangat bergantung pada kemampuan elite, motif pribadi dan orientasi berpikir para elite yang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan, baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikannya. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (Anggara, 2013).

4. Faktor Administrasi

Berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di antaranya disebabkan karena tidak terdata atau tidak memiliki KTP. Hal administratif seperti inilah yang akan berpengaruh dalam keikutsertaan pemilih. Keakuratan data juga menjadi faktor penentu,

baik data pemilih maupun data kependudukan. Tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Jika tingkat validitas DPT rendah hingga DPT ganda, maka banyak warga yang akhirnya tidak hadir saat pemilihan. Dalam proses pemilihan kepala daerah, sering terjadi permasalahan – permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul pada tahap persiapan, namun juga terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Permasalahan tidak akuratnya data pada penetapan data pemilih, merupakan masalah mendasar dan hamper seluruh pemilihan kepala daerah mengalami ketidakakuratan data pemilih (Agustino, 2009). Masalah lain yang juga berhubungan dengan administrasi adalah pada pendataan pemilih. Pendataan pemilih dan penjaminan bahwa seseorang telah terdaftar sebagai pemilih merupakan hak esensial dari warga negara. Kelemahan yang terjadi membawa implikasi pada legitimasi hasil pemilihan yang terkadang menghasilkan jumlah pemilih yang rendah sebagai akibat dari pemilih yang tidak terdaftar.

Karena keyakinan politik bersumber dari kesadaran politik, oleh sebab itu partisipasi politik warga Negara berkaitan erat dengan kesadaran politik. Sementara itu, tinggi rendahnya kesadaran politik ditentukan oleh pendidikan politik (sosialisasi politik). Tinggi rendahnya kesadaran politik untuk dapat terlibat dalam

proses politik, dapat terlihat dari budaya politik yang dianut.

Menurut (Surbakti, 1999) faktor-faktor yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi politik tersebut Paige membagi partisipasi politik ke dalam 4 tipe, yaitu :

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik akan cenderung aktif.
2. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik akan cenderung pasif atau tertekan (apatis).
3. Apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipan cenderung tidak aktif (pasif)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian memiliki aspek ilmu pengetahuan dan teori. Sedangkan terencana dikarenakan penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data (Semiawan, 2010).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Dumai. Alasan menetapkan lokasi ini karena Kota Dumai merupakan salah satu Kota dengan wilayah administratif terluas di Provinsi Riau dan juga di Indonesia. Selain itu, pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi

Riau, hanya Kota Dumai yang mengalami penurunan jumlah partisipasi paling signifikan disaat daerah lainnya mengalami kenaikan jumlah partisipasi.

2. Jenis Data

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

3. Sumber Data

Informasi penelitian dalam penelitian kualitatif didapatkan dari informan atau narasumber baik secara individu maupun mewakili suatu kelompok. Informan tersebut juga merupakan orang – orang yang memiliki peran penting dalam penelitian ini. Informan penelitian adalah orang yang memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan metode teknik pengumpulan data lewat wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu cara pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi baru. Dengan melakukan analisa data untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan sehingga data yang dihasilkan akan lebih mudah dipahami serta menjadi suatu solusi baru didalam suatu permasalahan di kehidupan masyarakat. Data yang telah diperoleh yang menggambarkan tentang Penurunan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Dumai Pada Pilkada Kota Dumai Tahun 2020 yang selanjutnya diolah dengan teknik analisa data kualitatif.

Berdasarkan analisa penulis maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik secara sederhana adalah sebuah ukuran tentang bagaimana nilai dari sebuah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah atau sistem politik. Faktor yang dijabarkan merupakan faktor yang memang dominan terjadi pada tahapan Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020. Dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Dumai pada Pemilihan Walikota Dumai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Faktor Teknis

Adanya kendala teknis yang di hadapi oleh pemilih. Kendala teknis ini biasanya adalah sesuatu yang terjadi di luar kuasa dari pemilih sehingga pemilih terhalangi untuk turut serta dalam menggunakan hak pilihnya. Biasanya meliputi kondisi ketika pemilih sedang sakit, adanya kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, pemilih sedang berada diluar daerah serta aktivitas pekerjaan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut berkaitan juga dengan situasi politik yang juga dapat mempengaruhi keadaan pemilih secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana sekitar, dan ancaman. Dengan latar belakang masyarakat Kota Dumai yang juga merupakan para pekerja yang di dominasi oleh pedagang serta karyawan perusahaan membuat masyarakatnya lebih fokus kepada rutinitas kesehariannya. Hal tersebut juga sejalan dengan teori dari Davis, dimana terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif didalam kegiatan partisipasi politik, yaitu adanya penyertaan pemikiran dan perasaan, adanya motivasi untuk berkontribusi, serta adanya tanggungjawab bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur penting tersebut harus datang dari diri sendiri, sehingga ketika keinginan atau dorongan tersebut tidak muncul maka keinginan untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik menjadi rendah atau bahkan tidak ada. Dengan latar belakang masyarakat Kota Dumai yang juga merupakan para pekerja yang di dominasi oleh pedagang serta karyawan perusahaan membuat masyarakatnya lebih fokus kepada rutinitas kesehariannya. Hal tersebut juga sejalan dengan teori dari Davis, dimana terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif didalam kegiatan partisipasi politik, yaitu adanya penyertaan pemikiran dan perasaan, adanya motivasi untuk berkontribusi, serta adanya tanggungjawab bersama. Unsur penting tersebut harus datang dari diri sendiri, sehingga ketika keinginan atau dorongan tersebut tidak muncul maka keinginan untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik menjadi rendah atau bahkan tidak ada. Sehingga dalam kondisi yang tidak normal tersebut tentunya juga tidak mudah bagi setiap pasangan calon untuk melaksanakan sosialisasi seperti biasanya. Setiap pasangan calon juga harus mampu memanfaatkan teknologi lewat dunia maya untuk meminimalisir kerumunan massa namun tetap dapat mengumpulkan partisipasi masyarakat. Wabah pandemi *Covid-19* yang terjadi bukan hanya menjadi wabah virus nasional bahkan hingga seluruh dunia, sehingga pengendaliannya tergolong sulit apalagi di tahun 2020 menjadi tahun yang juga berat bagi Indonesia karena pasien dan korban yang terus meningkat hingga sulit dikendalikan. Hal tersebut tentunya menjadi momok menakutkan bagi masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah, termasuk untuk terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi kepala daerah. Pemerintah memlaui penyelenggara pemilu yaitu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sudah melaksanakan protokol

kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masyarakat pada akhirnya tetap memiliki pilihan untuk tetap datang atau tidak pada saat hari pemilihan.

2. Faktor Politik

Aspek politik dari masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan seseorang yang tidak punya pilihan di antara kandidat yang tersedia hingga ketidakpercayaan terhadap partai politik. Hal ini juga merupakan suatu kesadaran seseorang akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat seseorang hidup. Berkaitan dengan minat serta kandidat pilihan saat masa pemilihan, pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020 terdapat satu orang calon Walikota yang tidak dapat mengikuti proses pemilihan hingga selesai dikarenakan terserang wabah pandemic Covid -19. Calon Walikota tersebut yaitu Eko Suharjo sebagai calon dengan nomor urut dua, selakaligus calon Walikota petahana.

Beliau meninggal pada bulan November tahun 2020 bertepatan dengan 40 hari menjelang pemilihan, disaat persiapan pemilihan sudah hampir selesai dilaksanakan serta surat suara yang telah dicetak. Sehingga calon tersebut tidak dapat digantikan, selain itu juga tidak ada aturan yang mengatur tentang penggantian calon. Dalam hal ini tentunya para pendukung, loyalis, maupun simpatisan mengalami kemungkinan penurunan minat untuk tetap memilih dikarenakan calon yang akan dipilih sudah tidak ada. Namun, setiap individu masyarakat pada akhirnya juga memiliki pilihan masing – masing untuk dapat menggunakan hak pilih maupun sebaliknya tidak menggunakan hak pilih. Karena, pada saat pemilihan setiap individu juga tidak dapat dipaksakan untuk

menggunakan hak suaranya pada hari pelaksanaan. Hal – hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat yang merasa tidak memiliki pilihan diantara kandidat yang tersedia, ataupun ketidakpercayaan bahwa Pilkada tidak akan membawa perubahan seta perbaikan yang berarti.

3. Faktor Sosialisasi

Intensitas dari pemilihan di Indonesia yang cukup tinggi tentunya menjadikan sosialisasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dari partisipasi politik dari masyarakat. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020 tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pemilihan yang demokratis. Bawaslu Kota Dumai selaku lembaga pengawas pemilihan, berkonsolidasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk turut serta menciptakan suasana pemilihan ditengah masyarakat serta menjaga netralitas dari aparat sipil negara. Dengan konsolidasi dari Bawaslu Kota Dumai, tentunya juga akan menciptakan suasana pemilihan umum yang kondusif serta terwujudkan kegiatan sosialisasi untuk menarik partisipasi dari masyarakat. Karena suasana yang kondusif dalam pemilihan juga dapat meningkatkan atensi dari masyarakat.

Apalagi dalam suasana pandemi, tentunya masyarakat tidak ingin juga diributkan dengan hal – hal yang terkait dengan sosialisasi untuk pemilihan. Sehingga upaya konsolidasi tersebut tentunya juga memberi pengaruh terhadap keikutsertaan dari masyarakat serta meminimalisir kaum golput (golongan putih).

Untuk meminimalisasikan golput (golongan putih), Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai beserta jajarannya telah melakukan sosialisasi – sosialisasi baik itu untuk daerah – daerah perbatasan, para pemilih pemula, menyebarkan brosur – brosur, memasang spanduk dan baleho – baleho, serta melaksanakan sosialisasi dengan cara pertemuan – pertemuan dan kelompok – kelompok masyarakat.

Didalam menjangkau partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Dumai tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melaksanakan program - program untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut dijabarkan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Berikut disajikan data gabungan hasil partisipan pada sasaran sosialisasi yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Tabel 3. Penjabaran Kegiatan Sosialisasi yang Telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

NO	Kegiatan yang diadakan	Jumlah Partisipan Kegiatan
1.	Membentuk RELASI (Relawan Demokrasi), terdiri atas beberapa basis yaitu, keluarga, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Penyandang Disabilitas, Komunitas, Keagamaan dan Warga Internet.	450 Orang

2.	Melaksanakan sosialisasi rumah pintar pemilih Lewat sosialisasi rumah pintar, KPU Kota Dumai datang ke Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dumai serta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning.	100 Orang Mahasiswa
3.	Menjemput suara khusus disabilitas melalui relawan demokrasi	100 Orang Penyandang Disabilitas

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari hasil Program/kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai didapatkan partisipasi masyarakat sebagai berikut, Program yang dilaksanakan KPU Kota Dumai adalah membentuk RELASI (Relawan Demokrasi). Relasi terdiri dari beberapa basis yaitu Keluarga, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Penyandang Disabilitas, Komunitas, Keagamaan dan Warga Internet. Lewat relawan tersebut KPU Kota Dumai mensosialisasikan tahapan pilkada serta berbagai kegiatan Pilkada Kota Dumai tahun 2020 untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut diadakan dengan jumlah peserta terbanyak yaitu 450 orang dari sepuluh basis dengan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka lewat tiga kali kegiatan. Selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai adalah melaksanakan sosialisasi rumah pintar pemilih yang mana program tersebut juga merupakan program utama dari KPU RI kepada seluruh KPU di seluruh daerah termasuk Kabupaten/Kota. Lewat sosialisasi rumah pintar, KPU Kota Dumai datang ke Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dumai serta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning. Untuk kegiatan ini dilaksanakan dengan dua kali kegiatan dengan peserta 100 orang mahasiswa. Lalu yang terakhir berdasarkan data strategi sosialisasi Pilkada 2020 yang di paparkan oleh KPU Kota

Dumai kepada KPU Provinsi Riau, ditemukan hasil bahwa KPU Kota Dumai menyorot salah satu program utama yaitu menjemput suara disabilitas melalui relawan demokrasi pada pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan rentang waktu 10 Oktober hingga 29 Oktober 2020 dengan jumlah peserta 100 orang dengan daerah utama Area Dumai Kota, Area Bukit Batrem Dumai Timur, serta Area Bagan Besar.

Dari hasil tersebut memang terbukti adanya peningkatan partisipasi dari pemilih disabilitas di Kota Dumai. Hal tersebut juga terbukti dengan Kota Dumai sebagai daerah yang mendapatkan partisipasi pemilih disabilitas tertinggi yakni mencapai 91,97%. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa minimnya program sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai menjadi salah satu penyebab sehingga partisipasi politik dari masyarakat Kota Dumai mengalami penurunan. Program yang diadakan contohnya untuk pemilih disabilitas nyatanya mampu meningkatkan partisipasi dengan memberikan perencanaan, persiapan serta pelaksanaan sosialisasi yang teratur. Salah satu kegiatan yang biasa dilaksanakan pada saat sosialisasi pemilihan adalah diskusi politik, yang mana merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan untuk tukar pikiran mengenai masalah – masalah publik untuk kemudian dicari pemecahannya yang secara langsung dapat berpengaruh pada

kebijakan publik. Kegiatan ini sering dilakukan baik oleh sesama praktisi politik maupun orang – orang yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan atau masalah publik, maupun dilaksanakan secara resmi sebagaimana halnya yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Yang mana kegiatan diskusi politik diselenggarakan sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara pemilihan, calon – calon yang terlibat didalam pemilihan maupun para tokoh serta praktisi yang berada dibidang politik atau pemerintahan.

Dengan kegiatan ini, masyarakat bisa lebih mengenal calon pemimpin serta mengetahui ide serta gagasan ketika akan memimpin. Selain itu, para calon pemimpin juga dapat mengemukakan berbagai pandangan serta gagasan masing - masing sehingga dapat menjadi sumber munculnya ide – ide baru.

4. Faktor Administrasi

Keakuratan data menjadi salah satu faktor administrasi yang dapat berpengaruh terhadap keikutsertaan pemilih. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilaha Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/ Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pemutakhiran pemilih juga dilaksanakan secara berurutan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai. Upaya pengawasan telah dilaksanakan dimulai dari penentuan data pemilih tetap (DPT), selanjutnya dibentuknya Panitia Pengawas Pemilu (PPS) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan hingga tingkat terbawah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bawaslu Kota Dumai dalam membentuk

Panitia Pengawas Pemilih sebagai bentuk upaya dalam pengaturan serta pemeliharaan data yang bertujuan untuk dapat mengelola serta memantau data pemilih untuk kemudian disusun kedalam daftar pemilih. Dengan pembentukan Panitia Pengawas Pemilih maka akan semakin mempermudah dalam mengelola serta data pemilih yang telah tersedia.

KESIMPULAN

Faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain, faktor teknis pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020 yang cenderung terjadi serta dialami oleh calon pemilih adalah kondisi sakit pandemi Covid – 19 sehingga menghambat masyarakat untuk beraktifitas serta menimbulkan rasa takut untuk beraktifitas diruang publik. Rutinitas masyarakat Dumai yang dominas merupakan pekerja sehingga membuat mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa karena kondisi masyarakat yang lebih memikirkan kondisi sosial ekonomi. Faktor politik juga datang dari masyarakat yang lebih memikirkan urusan pribadi serta tidak tertarik maupun merasa tidak memiliki pilihan saat akan memilih, hal tersebut dipengaruhi oleh perspektif masyarakat yang beranggapan pemilihan tidak akan sepenuhnya mempengaruhi keadaan masyarakat kedepannya. Untuk faktor sosialisasi, karena Indonesia sering mengadakan pemilihan maka kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemilihan serta tertarik untuk ikut serta. Oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan Ormas maupun LSM untuk dapat memperluas jangkauan informasi serta mengadakan kegiatan atau forum diskusi politik terbuka untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu administrasi, berkaitan

dengan data pemilih tetap pada Pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020, KPU Kota Dumai telah melaksanakan kerjasama dengan Disdukcapil Kota Dumai beserta Bawaslu Kota Dumai untuk menjaga serta mengumpulkan data pemilihan. Namun, kendala terjadi seperti pemilih yang tidak memiliki E – KTP, masih banyak terdapat pemilih yang ganda, serta server aplikasi data pemilih yang masih sering *down* ataupun *overload* saat menghimpun data.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian terhadap penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Dumai Tahun 2020, antara lain :

1. Lembaga penyelenggara pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, untuk dapat membuat inovasi serta variasi terhadap sosialisasi yang diadakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memiliki ketertarikan baru serta keinginan untuk ikut serta didalam pemilihan.
2. Partai Politik peserta pemilihan juga harus turut serta terlibat dalam membuat ide-ide baru untuk meningkatkan partisipasi sehingga dapat mendulang simpati dari masyarakat untuk turut serta didalam pemilihan.
3. Masyarakat selaku target dari sosialisasi serta sumber dari partisipasi didalam pemilihan harus lebih terbuka terhadap berbagai kegiatan sosialisasi dan tahapan yang diadakan oleh KPU. Sifat alergi terhadap politik juga harus dihilangkan dalam diri masyarakat itu sendiri. Karena perubahan dimulai dari sesuatu hal yang kecil kearah yang besar serta lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan E-book

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. In L. Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (p. 121). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. In S. Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (pp. 155 - 156). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. In M. Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik* (p. 461). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gatara, S. (2008). *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani, H. A., & Andriani, H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*.
- Ranjabar, J. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. In J. Ranjabar, *Sistem Politik, Demokrasi, dan Pendidikan Politik* (p. 230). Bandung: Alfabeta.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori - teori Politik*. In P. A. Sitepu, *Teori - teori Politik* (p. 101). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- SR, A. A., Ghofur, A., Aziz, A. U., Fatkhuri, Tamaw, F., & Sekarwati. (2019). *Politik Indonesia Kini, Potret Budaya Politik hingga Dinamika Politik*. In A. A. SR, A. Ghofur, A. U. Aziz, Fatkhuri, F. Tamaw, & Sekarwati, *Politik Indonesia Kini, Potret Budaya Politik hingga*

Dinamika Politik (p. 206). Malang: Intrans Publishing.

Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. In R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (p. 140). Jakarta: PT.Grasindo.

B. Jurnal

Akbar, M. A. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi. *Diserta diploma Program Studi Politik Indonesia Terapan IPDN*.

Fathah, E. S. (n.d.). *Fenomena Golput dan Krisis Kepercayaan*. Retrieved from <http://lampungpost.com>

Febi Mutia, H. (2021). Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Dumai tahun 2020. *JOM FISIP UNRI*, Vol.8 : Edisi II.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 6

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

D. Media Online

Bambang (2020, 3 November). Hallo Riau. Retrived Juli 8, 2022, from HalloRiau : <https://www.halloriau.com/read-politik-138138-2020-11-03-kpu-dumai-evaluasi-relasi-bahas-program-kerja-tingkatkan-partisipasi-masyarakat.html>

Bawaslu_kampar. (2020, Desember 9). *bawaslu_kampar*. Retrieved Juli 8, 2022, from *bawaslu_kampar* website:

<https://kampar.bawaslu.go.id/9-kabupaten-kota-di-riau-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2020/>

KOMISI II DPR-RI. (2020, September 21). *DPR-RI KOMISI II*. Retrieved Juli 8, 2022, from DPR-RI KOMISI II: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30143/t/Pilkada+Serentak+Tetap+9+Desember+2020>

Unik Susanti (2021, 20 Desember) . Cakaplah. Retrived Juli 8, 2022, from Cakaplah : <https://www.cakaplah.com/berita/baca/79191/2021/12/20/evaluasi-pilkada-2020-kpu-partisipasi-pemilih-disabilitas-di-riau-sangat-tinggi#sthash.B0t6XR9t.dpbs>

Wikipedia. (2022, September 27). *Wikipedia.org*. Retrieved Oktober 11, 2022, from Wikipedia Website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai